

ABSTRAK

PERAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Abdul Rahmat Tumanggor *

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara untuk senantiasa melakukan upaya dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di provinsi Sumatera Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum bagi pecandu dan penyalahguna narkotika, bagaimana penegakan hukum terhadap pecandu dan pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bagaimana kendala pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Pengaturan hukum peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dimana pengedar tersebut dikenakan sanksi dengan hukuman terberat yaitu hukuman mati sebagaimana terdapat di Pasal 114 dan 119. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Penegakan hukum terhadap peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah meliputi upaya penanggulangan secara *non penal policy* yaitu upaya *pre-emptif* (penyuluhan) dan *preventif* (pencegahan). Upaya *pre-emptif* yang dilakukan adalah dilakukan patroli dialogis sedangkan upaya *preventif* yang dilakukan adalah dengan melakuka razia-razia di tempat-tempat hiburan malam. Upaya penanggulangan secara *penal policy* lebih menitikberatkan pada tindakan *represif* (penindakan secara langsung)..

Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa Kendala pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah disebabkan keterbatasan personil penyidik, keterbatasan anggaran serta kemampuan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Peran, Penegakan Hukum, Narkotika

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

ABSTRACT

THE ROLE OF POLRI IN LAW ENFORCEMENT OF THE CIRCULATION AND ABUSE OF NARCOTICS ACCORDING TO LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS

Abdul Rahmat Tumanggor *

The Directorate of Narcotics Investigation of the North Sumatra Regional Police to always make efforts to reduce the level of abuse and illicit trafficking of narcotics in the province of North Sumatra. The formulation of the problem in this study is how to regulate the law for narcotics addicts and abusers, how to enforce the law against narcotics addicts and users according to Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, what are the obstacles to eradicating narcotics trafficking in the jurisdiction of the Regional Police of North Sumatra

. This research is a descriptive analysis research that leads to empirical juridical research. Sources of data in this study are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from research at the North Sumatra Regional Police. Data collection tools are library research and field research.

The legal arrangements for narcotics distribution in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police are stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely where the dealer is subject to sanctions with the heaviest penalty, namely the death penalty as contained in Articles 114 and 119. The spirit and purpose of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is to prevent and eradicate the illicit circulation of narcotics in Indonesia. Law enforcement against the distribution of narcotics in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police includes efforts to deal with non-penal policies, namely pre-emptive (education) and preventive (prevention) efforts. Pre-emptive efforts are carried out by conducting dialogic patrols while preventive efforts are carried out by carrying out raids at night entertainment venues. Penal policy coping efforts focus more on repressive actions (direct prosecution).

Based on the results of the discussion, it is known that the obstacles to eradicating narcotics distribution in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police are due to limited investigator personnel, budget constraints and the ability of investigators in the process of investigating narcotics crimes.

Keywords: Role, Law Enforcement, Narcotics.

** Students of the Postgraduate Program in Legal Sciences, Islamic University of North Sumatra.*